



# REVIU KE-IV MATRIKS RENSTRA 2020 - 2024

PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA



**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
#melayani  
#bangsa**



<https://pt-jakarta.go.id/>



@pengadilantinggi\_dki\_jakarta



info.ptdkjakarta@mail.com





# PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

Jalan Letnan Jendral Suprpto, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510

Telp. 021-4254257 Fax 021-4254257

Email : [info.ptjakarta@gmail.com](mailto:info.ptjakarta@gmail.com) Website : [www.pt-jakarta.go.id](http://www.pt-jakarta.go.id)

---

## PERNYATAAN TELAH DIREVIU KE-IV PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Ke-IV Matriks Renstra 2020-2024 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai tata cara pelaksanaan Reviu. Substansi informasi yang dimuat dalam Matriks Renstra 2020-2024 menjadi tanggung jawab Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Matriks Renstra 2020-2024 telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Matriks Renstra 2020-2024 ini.

Jakarta, 01 Desember 2022

Penanggung Jawab



  
**Dr. SOEDARMADJI, SH., M.Hum.**  
Nip. 19560405 198203 1 005

**REVIU SHEET KE- IV**  
**MATRIKS RENSTRA 2020- 2024**  
**PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

Matriks Renstra 2020 - 2024 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di reviu menyelaraskan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

NO.	KOREKSI/SARAN/MASUKAN	HALAMAN
1	Perubahan Indikator pada Matriks Renstra	Lampiran
2	Perubahan Target pada Matriks Renstra	Lampiran



Jakarta, 01 Desember 2022

Penanggung Jawab

Dr. SOEDARMADJI, SH., M.Hum.

Nip. 19560405 198203 1 005

**REVIU KE-IV MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024  
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

INSTANSI : Pengadilan Tinggi DKI Jakarta  
 VISI : Terwujudnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Yang Agung  
 MISI : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi DKI Jakarta  
 2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan  
 3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta  
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

NO	TUJUAN		SASARAN		Target Jk. Panjang	Target Jk. Menengah	TARGET					STRATEGI					
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	URAIAN	INDIKATOR KINERJA			2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN (RINCIAN OUTPUT)	TARGET	Anggaran	
							7	8	9	10	11						12
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yangn pasti, transparan dan akuntabel	Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a	Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Tipikor	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	
				b	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Tipikor	90%	90%	90%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	Rp. 231.527.840.000,- Rp. 670.890.000,-

				c	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	50%	50%	30%	51%	56%	56%	56%	Program dukungan manajemen	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan BUA	- Layanan perkantoran - Layanan Umum	1.0 Layanan 1.0 Layanan	Rp. 231.527.840.000,- Rp. 670.890.000,-
				d	Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	3	3	100%	95%	3	3	3	Program dukungan manajemen	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Layanan Sarana Internal	3.0 Layanan	Rp. 492.000.000,-
			2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	e	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu. 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Tipikor	75%	75%	73%	99%	75%	75%	75%	Program penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	- Koordinasi - Sosialisasi dan Diseminasi - Perkara Hukum Perseorangan - Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara - Pemantauan dan Evaluasi serta pelaporan	5 Kegiatan 30.0 orang 830 perkara 36 orang 5.0 Laporan	Rp. 50.000.000,- Rp. 14.350.000,- Rp. 2.475.000.000,- Rp. 479.750.000,- Rp. 75.000.000,-
	Keterjangkauan pelayanan badan peradilan	Presentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a	Presentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-

2	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung		Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan teknis dan administrasi tingkat banding	a	Persentase Laporan hasil pengawasan yang tepat waktu	90%	90%	-	-	100%	100%	100%	Program dukungan manajemen	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan BUA	- Layanan perkantoran Layanan Umum	1.0 Layanan 1.0 Layanan	Rp. 231.527.840.000,- Rp. 670.890.000,-
															Program penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	- Koordinasi
			Peningkatan kualitas SDM	a	Jumlah tenaga teknis dan administrasi yang mengikuti bimbingan teknis (Bimtek)	70 Org	70 Org	-	-	70 Org	70 Org	70 Org	Program dukungan manajemen	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan BUA	- Layanan perkantoran - Layanan Umum	1.0 Layanan 1.0 Layanan	Rp. 231.527.840.000,- Rp. 670.890.000,-
															Program penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	- Sosialisasi dan Diseminasi



Jakarta, 01 Desember 2022

Ketua,

Dr. SOEDARMADJI, SH., M.Hum

NIP. 19560405 198203 1 005



# LAMPIRAN

## REVIU KE-III MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024 PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

**INSTANSI** : Pengadilan Tinggi DKI Jakarta  
**VISI** : Terwujudnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Yang Agung  
**MISI** : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi DKI Jakarta  
 2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan  
 3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta  
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

NO	TUJUAN		TARGET (20 Th)	SASARAN		TARGET					STRATEGI					
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN (RINCIAN OUTPUT)	TARGET	Anggaran	
																7
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	100%	1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a	Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Tipikor	100%	100%	-	-	-	Program dukungan manajemen	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan BUA	- Layanan perkantoran - Layanan Umum	1.0 Layanan 1.0 Layanan	Rp. 231.527.840.000,- Rp. 670.890.000,-
					b	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Tipikor	90%	95%	95%	98%	98%	Program dukungan manajemen	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan BUA	- Layanan perkantoran - Layanan Umum	1.0 Layanan 1.0 Layanan	Rp. 231.527.840.000,- Rp. 670.890.000,-
					c	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	30%	51%	33%	33%	33%	Program dukungan manajemen	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan BUA	- Layanan perkantoran - Layanan Umum	1.0 Layanan 1.0 Layanan	Rp. 231.527.840.000,- Rp. 670.890.000,-



					d	Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	100%	95%	3	3	3	Program dukungan manajemen	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Layanan Sarana Internal	3.0 Layanan	Rp. 492.000.000,-
2.	Keterjangkauan pelayanan badan peradilan	Presentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu. 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Tipikor (Reviu 2022)	73% 100%	99% 94%	95% 95%	98% 98%	98% 98%	Program penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	- Koordinasi - Sosialisasi dan Diseminasi - Perkara Hukum Perseorangan - Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara - Pemantauan dan Evaluasi serta pelaporan	5 Kegiatan 20.0 orang 830 perkara 36 orang 5.0 Laporan	Rp. 50.000.000,- Rp. 14.350.000,- Rp. 2.475.000.000,- Rp. 479.750.000,- Rp. 75.000.000,-
					b	Presentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%	100%	-	-	-	Program dukungan manajemen	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Layanan Sarana Internal	3.0 Layanan	Rp. 492.000.000,-



Jakarta, 01 September 2022

Ketua,

Dr. SOEDARMADJI, SH., M.Hum

NIP. 19560405 198203 1 005



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA  
NOMOR : W10.U/232/KP.01.1/12/2022**

**TENTANG  
PENETAPAN REVIU KE II IKU TAHUN 2022, RENSTRA TAHUN 2020-2024,  
PKT, RKT DAN RENCANA AKSI TAHUN 2022 PADA PENGADILAN TINGGI  
DKI JAKARTA**

**KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan visi dan misi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta maka perlu adanya penyesuaian kegiatan dan strategi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
  - b. bahwa berdasarkan hasil Reviu serta adanya perubahan strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta maka perlu penetapan Reviu ke II IKU Tahun 2022, Renstra Tahun 2020-2024, PKT, RKT dan Rencana Aksi Tahun 2022 pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  - 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
  - 5. Peraturan presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
  - 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Peradilan.

MEMUTUSKAN

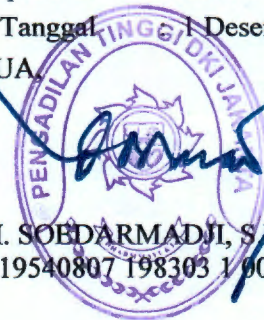
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA TENTANG PENETAPAN REVIU KE II IKU TAHUN 2022, RENSTRA TAHUN 2020-2024, PKT, RKT DAN RENCANA AKSI TAHUN 2022 PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**
- Kesatu** : Menetapkan Reviu ke II IKU Tahun 2022, Renstra Tahun 2020-2024, PKT, RKT dan Rencana Aksi Tahun 2022 pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sehingga keseluruhannya sebagaimana tercantum pada lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 1 Desember 2022

KETUA

  
Dr. H. SOEDARMADJI, S.H., M.Hum.  
NIP. 19540807 198303 1 003





**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA  
NOMOR : W10-U/139 /KP.01.1/7/2022**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN REVIU IKU, RENSTRA, PKT DAN RKT TAHUN 2022  
PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

**KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/III/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI maka perlu untuk dilakukan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

b. bahwa untuk melaksanakan Reviu IKU, RENSTRA, PKT dan RKT tahun 2022 maka perlu untuk dibentuk Tim;

c. bahwa nama – nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Reviu IKU, RENSTRA, PKT dan RKT tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Peradilan;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;

7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/III/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI;

8. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1703/SEK/OT.01.2/7/2022 tentang Penginputan/Update Data Capaian Kinerja pada Aplikasi e-SAKIP Mahkamah Agung.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA TENTANG TIM PENYUSUN REVIU IKU, RENSTRA, PKT DAN RKT TAHUN 2022 PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA.**

Kesatu : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, untuk menetapkan RENSTRA, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;

- Kedua : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama IKU, RENSTRA, PKT dan RKT bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu – isu strategis di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta agar tetap memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 28 Juli 2022

DI. H. SOEDARMADJI, S.H., M.Hum  
NIP. 195604051982031005

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta  
 Nomor : W10-U/134/KP.01.1/7/2022  
 Tanggal : 28 Juli 2022  
 Tentang :

**TIM PENYUSUN REVIU IKU, RENSTRA, PKT DAN RKT TAHUN 2022  
 PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SURAT KEPUTUSAN
1	Dr. H. Soedarmadji, S.H., M.Hum. NIP. 195604051982031005	Ketua	Pembina
2	Heru Pramono, S.H., M.Hum NIP. 196111191985121001	Wakil Ketua	Ketua Tim
3	Bukaeri, SH., MM NIP. 19621006 198303 1 005	Panitera	Wakil Ketua Tim
4	Sudiyanto, S.H., M.H. NIP. 19691130 199203 1 001	Sekretaris	Sekretaris Tim
5	Tony Pribadi, S.H., M.H. NIP. 19570725 198612 1 001	Hakim Tinggi	Koordinator
6	H. Edwarman, S.H. NIP. 19560815 198303 1 005	Hakim Tinggi	Anggota
7	H. Mulyanto, S.H., M.H. NIP. 19570502 198403 1 001	Hakim Tinggi	Anggota
8	Drs. Amin Sembiring, S.H., M.H. NIP. 195509081985121001	Hakim Tinggi	Anggota
9	Itjah Minantika, SE.,SH.,MH NIP. 19770530 200502 2 001	KaBag. Perencanaan dan Kepegawaian	Anggota
10	Sabrina Napitupulu, SE., MH NIP. 19661012 200604 2 001	KaBag Umum dan Keuangan	Anggota
11	Jul Rizal, SH., MH NIP. 19610731 198303 1 004	Panitera Muda Perdata	Anggota
12	Sutrisno Bardi SH., MH NIP. 19601010 198103 1 008	Panitera Muda Pidana	Anggota
13	Watty Wiarti, SH., MH NIP. 19630327 198503 2 002	Panitera Muda Hukum	Anggota
14	L.R Sophan Girsang, SH., MH NIP. 19620613 198912 1 003	Panitera Muda Khusus Tipikor	Anggota
15	Amir Nurllah, SH NIP. 19810725 200112 1 003	Kasub. Bag TU & RT	Anggota
16	Dwinanto, SE., SH NIP. 19810525 200904 1 001	Kasub.Bag Keu & Pelaporan	Anggota
17	Destian Bimantoro, S.Kom NIP. 19851213 201101 1 007	Kasub Bag. Kepegawaian dan TI	Anggota
18	Indah Pratiwie, S.E., M.M. NIP. 198806262011012025	Kasub Bag. Renprog & Ang	Anggota
19	Budiarto, S.H., M.H. NIP. 19740112 199403 1 001	Panitera Pengganti	Anggota

KETUA,  
  
  
 Dr. H. SOEDARMADJI, S.H., M.Hum  
 NIP. 195604051982031005



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA  
NOMOR : W10-U/ 145 /KP.01.1/12/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
TAHUN 2020-2024, PKT, RKT DAN RENCANA AKSI TAHUN 2022  
PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

**KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, PKT, RKT dan Rencana Aksi Tahun 2022 pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tentang Pembentukan Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, PKT, RKT dan Rencana Aksi Tahun 2022 pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
- Mengingat :**
1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
  7. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  8. Diktum ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Negeri (Tingkat Pertama), ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing;

9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor : SE/31/M.PAN/12/2014 tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA TENTANG TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020-2024, PKT, RKT DAN RENCANA AKSI TAHUN 2022 PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**
- Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, PKT, RKT dan Rencana Aksi Tahun 2022 pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2022

KETUA

  
Dr. H. SOEDARMADJI, S.H., M.Hum.  
NIP. 195604051982031005



Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta  
Nomor : W10-U/145/KP.01.1/12/2022  
Tanggal : 30 Desember 2022

**TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020-2024, PKT, RKT  
DAN RENCANA AKSI TAHUN 2022 PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

No.	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	Dr. H. Soedarmadji, S.H., M.Hum. NIP. 19560405 198203 1 005
2.	Penanggung Jawab	Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum NIP. 19611119 198512 1 001
3.	Pengarah Bidang Yudisial	H. Tavip Dwiyatmiko, S.H., M.H. NIP. 19641110 198702 1 001
4.	Pengarah Bidang Non Yudisial	Sudiyanto, S.H., M.H NIP. 19691130 199203 1 001
5.	Pelaksana	1. Jul Rizal, SH.,MH NIP. 19610731 198303 1 004 2. Lorentius Raja Sophan Girsang, S.H., M.H NIP. 19620613 198912 1 003 3. Watty Wiarti, SH., MH NIP. 19630327 198503 2 002 4. Eddy Wiyono, SH. M.H NIP. 19650929 199003 1 001 5. Amir Nurlah, SH NIP. 19810725 200112 1 003 6. Dwinanto, SE.,SH NIP. 19810525 200904 1 001 7. Destian Bimantoro, S.Kom NIP. 19851213 201101 1 007 8. Indah Pratiwie, S.E., M.M. NIP. 19880626 201101 2 025
6.	Tim Pengolah Data	1. Andral, S.H NIP. 19720309 199303 1 004 2. Gita Yunia Marsya, S.E NIP. 19950620 201903 2 010 3. Dwiningtyas Anggraeni, S.E NIP. 19910616 202012 2 009 4. Suci Wulan Asri, A.Md.Ak NIP. 19970806 202012 2 008 5. Meidina Silmi Putri, S.H NIP. 19980523 202203 2 012 6. Rina Asri Kurniawati, S.H 7. Agus Setiawan, S.S
7.	Sekretariat	1. Itjah Minantika, SE., SH., MH NIP. 19770530 200502 2 001 2. Sabrina Napitupulu, SE, MH NIP. 19661012 200604 2 001 3. Indah Pratiwie, S.E., M.M. NIP. 19880626 201101 2 025 4. Budiarto, S.H., M.H. NIP. 19740112 199403 1 001

KETUA

Dr. H. SOEDARMADJI, S.H., M.Hum.  
NIP. 19560405 1982031005